

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulah, Rozali. 1986. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press. Hlm 24

G. Sorensen, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 12

H.Purba, L. A. 2010. Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 11

Hartini, S. 2009. Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinamika Hukum, Hlm 264.

Miftah Thoha, 1997, Adminstrasi Kepegawaian Daerah, Ghalia, Jakarta. Hlm 32

Mulyono, A. 2015. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah. JKMP (ISSN. 2338-445X), Hlm 19.

Rusliwa, G. S. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara Sosial Humaniora, Hlm 64.

Satoto, Sukamto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Yogyakarta: CV Hanggar Kreator. Hlm 45

Sofian Effendi, 1999, Kebijakan kepegawaian Negara dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan pasca Pemilu 1999. Hlm 5

Sri Hartini, dkk. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 4

B. Jurnal

Amin, L. O, Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008), *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol 1 No. 1, 1 Juni 2003, Hlm 45

Bagus Sarnawa, Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol 24, No 1 Juni 2017, Hlm 3

Editorial, ASN Wajib Netral pada Pilkada 2015, *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol 3 No 2, 4 Oktober 2015, Hlm 42

Kurnia, L, Penyelesaian Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol 2, No 10, 2 Juni 2013. Hlm 9

- Marbun, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, Vol 2, No 3, 12 Januari 1998, Hlm 10
- Martini, R, Politisasi Birokrasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik* , Vol 11, No 3, 10 Oktober 2010, Hlm 21
- Mat Zudi, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Elektronik (e-journal) Diponegoro Law Review*, Vol 2, No 1, Mei 2012. Hlm 11
- Patria, A, Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*, Vol 1 No 2, 2 April 2015, Hlm 5
- Watunglawar, M. N, Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Pascasarjana Universitas Jember*, Vol 1, No 3, Mei 2015, Hlm 34.
- Yamin, M. H, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar, *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum*, Vol 2, No 1, 23 Juni 2013, Hlm 54

C. Website

- Apriyadi, Anas. (2016). Netralitas PNS Pilkada Bantul, BKN Rekomendasikan Sanksi. Bantul: Tribunjogja.com
- Idhom, A, M. (2015). Panwaslu Temukan Pejabat dan Perangkat Desa Dukung Inkumben. Yogyakarta : Tempo.com
- Musyaqim, A. (2016). Pemkab Bantul Diminta Awasi 15 ASN tak Netral. Yogyakarta : Metrotvnews.com
- Noname. (2019). Hanya Dua Pelanggaran Kampanye Bisa Disidangkan. Bantul:Kompas.com
- RI, Bawaslu. (2015). Memerangi Politisasi Birokrasi. In B. RI, Buletin Bawaslu (Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia) (p. 3). Jakarta: Bawaslu RI.
- Suryani Bhekti. (2015). Jago Kalah, Kasus 14 Pejabat PNS Bantul Jalan Terus. Bantul : Harianjogja.com

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.